



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUK SUWARNI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **757675**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 940.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. Tanah Seluas 82 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 675.000.000
4. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 117.000.000**

1. MOTOR, VESPA P150X Tahun 1981, WARISAN Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA NC110A1C AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA GL1581DF M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BY8 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU F700RG-TX MT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 8.800.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	1.065.800.000
III. HUTANG	Rp.	168.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	897.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.